

INDONESIA DALAM ORGANISASI INTER-PARLIAMENTARY UNION

SEJARAH PENDIRIAN DAN TUJUAN

Inter Parliamentary Union atau IPU adalah organisasi Internasional yang mewadahi parlemen dari negara-negara yang berdaulat. Pada saat ini, IPU adalah satu-satunya organisasi yang mewakili sisi legislative yang berskala global. IPU didirikan pada tahun 1889 dan keanggotaan IPU saat ini mencapai **173** parlemen nasional dan 11 asosiasi organisasi keparlemenan.

Misi IPU seperti yang dicantumkan dalam statutenya adalah memperjuangkan perdamaian dan kerjasama antar bangsa-bangsa dan untuk kedudukan lembaga perwakilan yang kokoh. Dengan mandate yang luas ini, organisasi ini berupaya memperkuat akar demokrasi keparlemenan diseluruh dunia.

Pertemuan IPU yang pertama diadakan pada tahun 1889 di Paris, jauh sebelum adanya institusi multilateral modern seperti sekarang ini. Baru-baru ini, eksistensi IPU mendapat pengakuan penting dari organisasi bangsa-bangsa sedunia, PBB dengan pemberian status observer pada tahun 2002, dengan hak khusus yang sangat luar biasa dimana IPU dapat mengedarkan dokumen di Sidang Umum PBB. Untuk IPU hal ini jelas merupakan pencapaian tinggi di tengah-tengah upayanya untuk memberikan dimensi keparlemenan di PBB.

Melihat kembali ke sejarah, IPU telah berhasil menjadi kanal bagi diplomasi parlemen. Di beberapa kesempatan, dimana hubungan antar eksekutif berada dalam tingkat yang buruk, para anggota Parlemen, dimotori oleh IPU berhasil mengupayakan jalan keluar. Bahkan seringkali pemecahan yang diambil lebih berorientasi kedepan dan orisinal. Hal-hal yang tidak pernah dapat dibayangkan oleh pemerintah.

Dunia mencatat bahwa lembaga parlemen kerap mendapat tekanan keras. Padahal di negara demokrasi, sesungguhnya mandate parlemen harus dilihat sebagai sesuatu yang mulia. Sayangnya ada negara yang belum siap dan menabukan kebebasan mengeluarkan pendapat yang sesungguhnya harus muncul di arena perdebatan seperti di parlemen. Banyak anggota parlemen yang masih harus memperjuangkan hak-hak mereka ini. Sebagai bagian dari komitmen IPU untuk menegakkan dan membela lembaga perwakilan, komisi IPU tentang Hak Asasi Anggota Parlemen menangani kasus-kasus pelanggaran hak-hak individu anggota parlemen, meliputi segala macam bentuk pelanggaran, mulai dari kasus pencabutan hak-hak parlemen diluar hukum hingga kasus pembunuhan.

Tidak semua program IPU untuk membela demokrasi selalu berhubungan dengan sisi kelam. Organisasi ini juga disibukan dengan karya untuk membantu parlemen baru agar dapat berpijak pada kakinya sendiri. Asistensi untuk hal-hal praktis dari tugas keseharian parlemen adalah salah satu bentuk bantuan yang sangat dihargai oleh anggota IPU. Saat ini sudah ada belasan parlemen yang terbantu oleh proyek asistensi teknis IPU ini.

Satu prinsip yang merupakan titik nadi dari kehidupan organisasi parlemen dunia ini adalah bahwa suara parlemen nasional harus didengar dalam institusi multilateral jika institusi ini ingin melahirkan keputusan demokratis yang menggemakan keprihatinan masyarakat biasa. Hal ini berarti parlemen harus lebih secara efektif mempengaruhi pemerintah dalam pengambilan kebijakan yang sejalan dengan keprihatinan masyarakat tersebut. Anggota IPU menginginkan agar prinsip di atas juga berlaku untuk institusi lain seperti *World Trade Organization (WTO)* yang mempunyai pengaruh luas dibidang perdagangan global dan multilateral. IPU pada saat ini di awal pembahasan untuk memberikan dimensi parlementer di lembaga perdagangan ini.

Dengan keyakinan bahwa anggota parlemen harus mewakili seluruh pemilihnya, IPU juga mempunyai komitmen yang kuat untuk meningkatkan cara dimana perempuan dapat terwakili di parlemen. Pada saat ini, selain provinsi-provinsi Nordik dan satu atau dua tempat lainnya, anggota parlemen perempuan menjadi minoritas kecil. Selain menyediakan sumber informasi statistik dari seluruh dunia mengenai isu ini, IPU juga menyelenggarakan seminar dan kegiatan lain yang didesain untuk memajukan hal-hal yang menjadi perhatian politisi perempuan di berbagai penjuru dunia.

Organisasi Parlemen Dunia ini mempunyai markas besar yang disebut *House of Parliaments* yang terletak di jantung kota internasional Jenewa sebagai pusat kehidupan parlemen. Markas Besar IPU – yang sebagian gedungnya dibangun pada abad lalu dan sebagian lagi modern – merupakan symbol visual dari upaya organisasi ini pada saat proses transformasi: membawa sebuah institusi

tua ke zaman modern. IPU kini kerap menjadi tuan rumah pertemuan parlemendi markas besarnya sendiri – disuatu tempat dimana anggota parlemen dapat bertemu di ruang pertemuan yang memadai. *House of Parliaments* juga membantu IPU untuk meningkatkan profilnya di tengah-tengah suasana internasional kota Jenewa, dengan mengadakan seminar-seminar tentang topik-topik yang menjadi perhatian utama organisasi ini, seperti misalnya pemajuan perdamaian dan demokrasi.



PROFIL PENDIRI IPU FREDERIC PASSY, RANDAL CREMER DAN ALBERT GOBAT

Frederic Passy dan Randal Cremer, anggota parlemen Perancis dan Inggris, keduanya adalah pendiri Uni-Parlemen Sedunia (IPU), memang sudah selayaknya memenangkan hadiah Nobel Perdamaian pada tahun 1901 dan 1903. Demikian juga Albert Gobat dari Switzerland yang memenangkan Nobel tahun 1902, mereka telah tercatat dalam sejarah.

Pada akhir abad ke-19, dimana kekuatan-kekuatan besar dunia sibuk mempersenjatai

angkatan perangnya yang kemudian berpuncak pada Perang Dunia, Frederic Passy dan Randal Cremer justru tengah memperjuangkan perdamaian, arbitrase dan pelucutan senjata. Tokoh-tokoh itu kini telah dilupakan sejarah, namun yang didirikan oleh Passy dan Cremer dengan visi yang bagus dan dana yang minim itu, kini menjelma menjadi organisasi parlemen dunia. IPU saat ini beranggotakan 173 parlemen nasional dan 11 asosiasi organisasi keparlemenan.

Dewasa ini, IPU merupakan sebuah forum yang mampu menampung wakil-wakil rakyat terpilih, tanpa memandang perbedaan politik, budaya dan agama, untuk bersama-sama menguraikan konflik-konflik yang melanda dunia, dan membawa aspirasi para pemilihnya ke meja perundingan multilateral. Dari awalnya yang sebagai organisasi non-pemerintah, IPU telah termasuk sebagai badan antar negara, dengan status social observer di PBB.

Perdamaian dan diplomasi parlemen adalah dua hal yang Passy, Cremer dan Gobat perjuangkan sejak lebih dari seratus tahun yang lalu. Sekarang, di seluruh dunia, ratusan anggota parlemen dan jutaan orang yang mereka wakili mendukung terus pembaharuan IPU menuju ke yang lebih baik. Seperti yang ditulis oleh Frederic Passy, "Dunia ini dibangun oleh mimpi. Mimpi hari ini adalah kenyataan buat esok hari."

STRUKTUR IPU

Anggota

Saat ini 173 parlemen menjadi anggota dan 11 asosiasi parlemen menjadi observer IPU.

Delegasi setiap negara mencerminkan dinamika dalam parlemen multi partai.

Governing Council IPU

Governing Council IPU adalah badan pleno pembuat keputusan dalam IPU. Setiap perwakilan parlemen anggota IPU yang menjadi delegasi council terdiri dari tiga orang, umumnya mewakili pandangan politik yang berbeda.

Council memutuskan semua permasalahan mengenai keanggotaan organisasi dan menyetujui program serta anggaran. Council juga memilih anggota dari badan Governing IPU dan khususnya presiden (untuk satu periode tiga tahunan). Council juga memilih Sekretaris Jenderal (untuk periode empat tahunan dan dapat dipilih kembali). Presiden Council sekarang Mr. Saber Chowdry, Anggota Parlemen Bangladesh (2014-2017).

Executive Committee

Executive Committee terdiri dari 15 Anggota Parlemen anggota IPU dengan memperhatikan pertimbangan geopolitik dan dipimpin oleh Presiden. Badan ini memberikan pertimbangan administrasi bagi IPU dan mempersiapkan rekomendasi untuk *Governing Council*.

Assembly

Assembly IPU bersidang dua kali tiap tahun untuk memungkinkan terjadi pertemuan multilateral antar anggota delegasi. Agenda tiap Assembly mencerminkan berbagai rangkaian

rangkaian dan permasalahan internasional yang sedang berlangsung. *Standing Committee* – keamanan dan perdamaian internasional; Pembangunan Berkelanjutan ; Keuangan dan Perdagangan; dan Demokrasi dan Hak Asasi Manusia – melaporkan kepada Assembly dan mempersiapkan resolusi untuk diadopsi.

Agenda tahunan IPU meliputi kegiatan sidang yang diadakan dua kali setahun. Sidang Assembly merupakan konferensi besar yang mengumpulkan ratusan anggota parlemen untuk membahas masalah penting dalam agenda internasional. Para anggotanya mengemukakan pandangan keparlemenan mengenai masalah-masalah aktual yang dirangkum dalam resolusi.

Pertemuan Anggota Parlemen Perempuan

Pertemuan Anggota Parlemen Perempuan diadakan saat menjelang sidang pertama Assembly. *Coordinating Committee*-nya bertemu juga pada waktu dua sidang assembly. Dibentuk pada tahun 1978, pertemuan anggota parlemen perempuan telah menjadi bagian dari struktur resmi IPU sejak tahun 1999. Pertemuan ini memberikan laporan pada sidang Council. Forum ini dihadiri oleh anggota parlemen perempuan dari delegasi parlemen yang menghadiri sidang IPU, yang mendiskusikan topik-topik yang berkaitan dengan status perempuan. Mereka juga mengadakan debat tentang topik di agenda assembly, sehingga perspektif mereka tercermin dalam hasil assembly.

Debat Panel

Sidang assembly juga memberikan kesempatan penyelenggaraan acara-acara semi

formal yang menyatukan anggota parlemen, para pakar dan jurnalis untuk berdiskusi mengenai topik-topik mulai dari perdagangan anak hingga masalah kewarganegaraan dan *statelessness*.

Sekretariat

Sekretariat berbasis di Jenewa. Sekretaris Jenderal Mr. Martin Chungong, bertanggungjawab untuk melaksanakan program kegiatan IPU.

IPU dibiayai secara langsung oleh Anggota-anggota melalui iuran. IPU menerima pula dukungan dana dari luar untuk kegiatan tertentu misalnya untuk kerjasama teknik.

AGENDA IPU

1. Memajukan Prinsip-prinsip Demokrasi

IPU membangun standar-standar dan norma-norma internasional sebagai bagian dari aksi-aksinya untuk memajukan sistem demokrasi dan pluralism dari suatu pemerintahan yang mencerminkan pilihan rakyat. Pada tahun 1994, IPU mengadopsi Deklarasi mengenai Pemilihan Umum yang bebas dan Jujur yang kemudian pada tahun 1997 diikuti oleh Deklarasi Universal mengenai Demokrasi.

Deklarasi Universal mengenai Demokrasi yang diadopsi IPU

Pada tahun 1995, IPU menghimpun para ahli dari berbagai wilayah disiplin ilmu untuk membangun standar internasional

mengenai demokrasi. Hasil dari kerja ini, Deklarasi Universal mengenai Demokrasi diadopsi pada tahun 1997. Demokrasi adalah bentuk ideal yang diakui secara universal, mendasarkan diri pada nilai-nilai umum manusia dimana saja tidak memandang perbedaan budaya, aliran politik, sosial ataupun ekonomi. Sebagai suatu bentuk ideal, demokrasi bertujuan untuk melindungi dan memajukan martabat dan hak dasar tiap individu, termasuk keadilan sosial dan menguatkan pembangunan ekonomi dan sosial. Demokrasi adalah system politik yang memungkinkan masyarakat untuk bebas memilih pemerataan yang efektif, jujur, transparan, dan bertanggungjawab. Demokrasi mendasarkan diri pada dua prinsip pokok : partisipasi dan pertanggungjawaban. Setiap orang mempunyai hak untuk ikut serta dalam pengaturan urusan masyarakat. Seperti halnya, setiap orang juga berhak mengakses informasi tentang kegiatan pemerintah, untuk bertanya pemerintahannya dan untuk mencari perbaikan melalui mekanisme hukum dan administrasi yang adil. Demokrasi adalah hal atau keadaan yang selalu dapat ditingkatkan. Mempertahankan demokrasi yang berkelanjutan berarti menjaga dan memperkuat budaya demokratis dengan segala cara, dan pendidikan adalah yang paling utama.

Saat ini tanggal 15 September ditetapkan sebagai peringatan hari Demokrasi Internasional. DPR RI sebagai anggota aktif IPU selalu mengadakan kegiatan dalam memperingati *International Day of Democracy* ini, misalnya dengan

simulasi rapat kerja komisi oleh siswa SMU dan talkshow di TV Nasional

Pengumpulan dan Penyebaran Informasi tentang Kerja Parlemen

IPU meningkatkan pemahaman dan pengetahuan parlemen dengan mengumpulkan informasi tentang kekuatan, struktur dan metoda kerja parlemen, menyebarkannya melalui publikasi dan website, dan menyampaikan informasi terbaru tentang pemilihan parlemen di seluruh dunia.

IPU menyediakan tiga database dalam dua bahasa (yaitu Inggris dan Perancis) yang dapat diakses langsung melalui website :<http://www.ipu.org>

- Parline (Parliament on Line) mengenai tata tertib, struktur, dan keberfungsian parlemen serta status keanggotaannya;
- Parlit tentang literatur yang berhubungan dengan keberfungsian parlemen suatu negara dan pemilihan umum untuk memilih parlemen
- Women in Politics tentang literatur yang berhubungan dengan semua aspek keikutsertaan perempuan dalam politik.

IPU juga mempublikasikan hasil study perbandingan mengenai keberfungsian parlemen dan pemilihan umum, antara lain:

- *Democracy: its Principles and Achievement*
- *Codes of Conduct for Elections*

- *Presiding Officers of National Parliamentary Assemblies*
- *The Parliamentary Mandate*

2. Memberikan Bantuan Teknis untuk Lembaga Demokrasi

IPU menjalankan program kerja sama teknis untuk membantu parlemen dalam membangun kapasitas untuk menjalankan tanggungjawab konstitusional mereka, termasuk pengawasan tindakan pemerintah. Yang berhak untuk mendapatkan program tersebut adalah parlemen dari negara yang baru terbentuk atau parlemen dari negara berkembang.

Dengan dukungan dari parlemen-parlemen anggotanya, IPU menyediakan bantuan teknis dan melaksanakan proyek bantuan. IPU telah melaksanakan proyeknya diantaranya parlemen-parlemen berikut : Burundi, Kamboja, Etiopia, Gabon, Rwanda, dan Uruguay, Albania, Argentina, Djibouti, Timor Timur, Equatorial Guinea. Bantuan serupa juga diberikan pada Kosovo.

3. Memajukan Kemitraan antara Laki-laki dan Perempuan dalam Politik

“Tercapainya demokrasi mempersyaratkan adanya kemitraan sejati antara laki-laki dan perempuan dalam pelaksanaan masalah-masalah kemasyarakatan yang mana mereka secara sejajar dan saling melengkapi, sehingga dapat saling memperkaya dari perbedaan-perbedaan yang ada”

Deklarasi Universal tentang Demokrasi ayat 4 (IPU, 1997)

“Demokrasi dibangun atas hak setiap orang untuk ikut serta dalam pengelolaan masalah publik; oleh karenanya memerlukan keberadaan lembaga-lembaga perwakilan di semua tingkat dan khususnya Parlemen dimana semua komponen masyarakat terwakili dan yang mempunyai kekuasaan dan cara yang dapat mengekspresikan keinginan masyarakat dengan membuat undang-undang dan mengawasi tindakan pemerintah.”

Deklarasi Universal tentang Demokrasi Pasal 11 (IPU, 1997)

Konsep ini telah menjadi tulang punggung upaya-upaya IPU dalam memajukan status perempuan. Pekerjaan tersebut mencakup banyak bidang dengan memusatkan perhatian pada peran serta perempuan dalam politik.

Selama lebih dari lima belas tahun, IPU telah mendorong perempuan untuk berpartisipasi dalam delegasi-delegasi yang menghadiri konferensi. Kehadirannya semakin meningkat dan sekarang rata-rata mencapai 25%. Pertemuan para anggota parlemen perempuan memberikan kesempatan kepada para anggota parlemen perempuan untuk bertemu dalam konferensi-konferensi tetap IPU. Pada tahun 1997, IPU membentuk Grup Kemitraan Jender, komposisinya terdiri dari dua laki-laki dan dua perempuan anggota parlemen, guna memastikan kepentingan dan pandangan dari

kedua jender tersebut dapat tercermin secara seimbang dalam semua kegiatan IPU. IPU telah mengamandemen Statutnya dan Tata Tertibnya untuk menghapus bahasa yang menonjolkan satu jenis kelamin dari jenis kelamin lainnya dan untuk memastikan bahwa perempuan telah terwakili dalam delegasi nasional yang menghadiri pertemuan-pertemuan antar parlemen, didalam *Executive Committee* IPU dan didalam semua komisi perumus.

IPU berkarya membuat strategi-strategi untuk membangun kemitraan yang lebih baik antara laki-laki dan perempuan dalam politik. Rencana aksi untuk memperbaiki ketidakseimbangan yang ada dalam partisipasi laki-laki dan perempuan dalam kehidupan politik karya IPU disusun oleh sebuah kelompok yang terdiri dari laki-laki dan perempuan dalam jumlah yang seimbangan yang mewakili berbagai budaya dan gerakan politik utama dunia. Pada mulanya dimaksudkan sebagai sumbangan untuk konferensi Dunia Keempat tentang Wanita (Beijing, September 1995), rencana tersebut membawa kemajuan besar di sejumlah negara dan didalam IPU sendiri.

Melalui berbagai studi dan survey, dan dengan memantau pandangan para anggota parlemen selama perdebatan dalam pertemuan-pertemuannya, IPU mencatat perubahan-perubahan global dalam hal hak perempuan untuk memberikan suara dan ikut menjadi calon dalam pemilihan dan memantau perubahan pola perwakilan didalam partai politik, parlemen dan pemerintah. Studi terbaru dalam bidang ini

“Politik: Wawasan Perempuan” – didasarkan pada serangkaian wawancara dengan perempuan-perempuan yang memaparkan pengalaman-pengalamannya didalam partai politik, parlemen dan pemerintah. Studi tersebut memetakan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh kaum perempuan dalam dunia politik yang keras dan mengkaji perubahan-perubahan yang telah dilakukan oleh kaum perempuan di arena politik.

Data-data sejarah dan statistik tentang perempuan di parlemen dapat diperoleh dalam berbagai publikasi IPU yang melaporkan perkembangan yang telah terjadi sejak 1945. Data-data tersebut juga dapat diakses melalui website IPU dimana dapat memperoleh informasi terbaru tentang pemilihan umum.

Website IPU juga menampilkan database yang dirancang untuk membantu para Anggota Parlemen untuk mendapatkan informasi tentang pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan perempuan database “perempuan dalam politik” memiliki hampir 1200 referensi bibliografi (berupa dokumen, laporan dan studi tentang perempuan dalam politik). Website tersebut juga memuat database tentang semua semua perundang-undangan yang ada berkenaan dengan multilasi alat kelamin perempuan yang merupakan bagian dari kampanye besar-besaran IPU untuk memerangi kekerasan terhadap kaum perempuan dan anak-anak. IPU juga mendorong parlemen agar perundang-undangan nasionalnya sejalan dengan Deklarasi PBB tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Kaum

Perempuan. Pada tahun 1997, dilakukan studi tentang dampak konflik bersenjata terhadap kaum perempuan dan anak-anak, dan dikeluarkan pernyataan tentang cara-cara menghapus semua bentuk perdagangan dan bentuk eksploitasi seksual lainnya terhadap kaum perempuan dan anak-anak. Lebih jauh lagi, buku pegangan untuk para Anggota Parlemen tentang Konvensi tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi terhadap Kaum Perempuan dan Optional Protokolnya telah diterbitkan. IPU memberikan perhatian lebih dekat lagi pada dampak jender terhadap penggunaan sumber daya nasional, dengan menyelenggarakan tiga kali seminar di Kenya, Mali dan Philipina, dimana budget nasional diteliti dari perspektif kesetaraan jender. Ada rencana untuk melaksanakan serangkaian seminar lanjutan, dan menyiapkan buku pegangan bagi para anggota parlemen tentang budget dan masalah jender.

IPU juga berusaha keras memperbaiki status perempuan dan memajukan kemitraan jender dengan membantu kaum perempuan dalam konteks nasional. Berkarya melalui program bantuan teknisnya, IPU telah mendukung para anggota parlemen Perempuan diantaranya di Jibouti, Burundi, Rwanda dan Timor Timur, dengan melaksanakan serangkaian proyek dari membuat pusat dokumentasi tentang perempuan sampai pada melaksanakan seminar tentang pembangunan kesadaran bagi para Anggota Parlemen atau meluncurkan kampanye pembangunan kesadaran nasional terhadap konstitusi atau perundang-undangan baru.

4. Perlindungan terhadap Anak

Dalam beberapa konferensi IPU terdahulu telah diorganisir diskusi panel dengan serangkaian topik tentang perlindungan terhadap anak-anak: mutilasi alat kelamin perempuan, tenaga kerja paksa anak-anak dan perdagangan anak-anak. Pada saat Pertemuan khusus Sidang Umum PBB tentang anak-anak, IPU mengorganisir pertemuan sehari para anggota parlemen yang menghadiri sidang khusus PBB tersebut. Para Anggota Parlemen tersebut memperdebatkan peran parlemen dalam melindungi anak-anak dan mendiskusikan masalah budget nasional agar dapat lebih memberikan perhatian pada kebutuhan anak-anak.

5. Perlindungan Hak Asasi Anggota Parlemen

Komisi IPU tentang HAM Anggota Parlemen, terdiri dari lima anggota parlemen yang mewakili lima region besar di dunia, dibentuk pada tahun 1976. Komisi tersebut melakukan penyelidikan terhadap pengaduan yang khusus berkaitan dengan pelanggaran HAM Anggota Parlemen; sehingga, merupakan satu-satunya badan sejenis di seluruh dunia. Sekali sebuah kasus dinyatakan dapat diterima untuk dibahas, Komisi tersebut akan melakukan semua cara agar dapat terlaksana dialog dengan pihak berwenang di negara yang bersangkutan guna mendapatkan penyelesaian yang memuaskan sehingga memenuhi standar hak asasi manusia. Guna mencapai tujuan tersebut, komisi tersebut juga melakukan kunjungan peninjauan ke lokasi kejadian (*on-site mission*). Komisi

tersebut telah berhasil membantu penyelesaian yang memuaskan dari sejumlah 1.538 kasus di 104 negara yang telah ditanganinya.

6. Menjaga Stabilitas Keamanan Internasional melalui mekanisme Dialog IPU

A. Memfasilitasi Pertemuan antara Anggota Parlemen Israel dengan Palestina

Pada tahun 1978, IPU membentuk Komisi untuk Masalah Timur Tengah guna mengatur dialog antara delegasi Arab dengan Israel dan mendorong dukungan parlemen bagi proses perdamaian. Komisi tersebut, yang terdiri dari enam Anggota Parlemen dari region yang berbeda, bersidang dengan delegasi dari Israel dan Palestina selama berlangsung rapat-rapat tetap IPU. Beberapa inisiatif telah dilakukan untuk penyelesaian pertikaian ini misalnya mengundang para anggota parlemen dari Knesset dan Dewan Legislatif Palestina untuk bertemu di Jenewa dan terakhir Presiden IPU telah mengunjungi Gaza pada bulan Maret 2008 namun tidak berhasil mengunjungi Israel dengan alasan sedang pembentukan pemerintahan baru.

B. Fasilitator untuk Masalah Siprus

Di tahun 1991, IPU membentuk suatu mekanisme untuk memonitor situasi di Siprus guna mendukung misi dari Sekretaris Jenderal PBB. Dewasa ini, Grup dari tiga "fasilitator" mengembangkan dialog selama pertemuan-pertemuan tetap antara para wakil rakyat yang ada di dua bagian pulau tersebut. Para fasilitator tersebut berpendapat bahwa

dialog informal yang dilangsungkan dalam kesempatan-kesempatan semacam itu akan membantu pihak-pihak yang bersangkutan menjadi lebih dekat lagi.

7. Memajukan Penegakan Hukum Kemanusiaan Internasional

IPU giat memanfaatkan sumber dayanya untuk memajukan penghormatan terhadap hukum kemanusiaan internasional (IHL-Internasional Humanitarian Law). Masalah tersebut telah diperdebatkan pada berbagai konferensi IPU dan didalam Komisi untuk Memajukan Penghormatan terhadap IHL, yang bekerjasama secara erat dengan Komite Internasional Palang Merah (*ICRC-International Committee of the Red Cross*).

IPU mengkampanyekan pelarangan penuh terhadap ranjau darat. Sebuah penelitian terhadap semua parlemen sedang dilaksanakan untuk memastikan posisi mereka dalam masalah tersebut, dan memetakan langkah-langkah yang diambil untuk meratifikasi Konvensi Ottawa tentang Pelarangan Penggunaan, Penimbunan, Produksi dan Transfer Ranjau Darat, dan menjamin musnahnya penimbunan yang ada, pembersihan ranjau darat dan perlakuan terhadap para korban dari senjata semacam itu. Pada tahun 1999, Komite untuk Memajukan Penghormatan terhadap IHL menyiapkan buku pegangan bagi para Anggota Parlemen berkenaan dengan penghormatan terhadap IHL, dengan mendapatkan masukan dari ICRC, dan membantu untuk mengorganisir konferensi

regional tentang hukum kemanusiaan internasional bagi parlemen-parlemen Afrika.

8. Pengadilan Kriminal Internasional

Sebagian besar anggota IPU mendukung dibentuknya suatu Pengadilan Kriminal Internasional (*IRC-International Criminal Court*), dan IPU mendorong parlemen-parlemen untuk meratifikasi Statuta Roma dan menjamin bahwa Pengadilan tersebut memiliki sumber daya manusia dan materi yang diperlukan untuk melaksanakan mandatnya itu.

9. Pembangunan Berkelanjutan, Keuangan, Perdagangan dan Lingkungan Hidup

A. Lingkungan Hidup

Inter-Parliamentary Union (IPU) mengambil sikap di garis depan terhadap masalah lingkungan hidup karena dianggap sangat penting terhadap suksesnya pembangunan berkelanjutan. IPU merupakan wadah bersama para anggota parlemen untuk membicarakan berbagai masalah dengan tujuan mempengaruhi berbagai keputusan yang akan diambil dalam forum internasional.

Diskusi antar anggota parlemen diharapkan dapat menghasilkan pengertian yang lebih baik bagi para anggota parlemen mengenai masalah-masalah yang penting terkait isu lingkungan hidup dan memungkinkan para anggota parlemen mendapatkan informasi tentang pembicaraan

atau negosiasi antar pemerintah yang menjadi Program Aksi (*Programme Action*).

B. Pembangunan Ekonomi dan Sosial

IPU berkeinginan memobilisasi aksi parlemen di bidang aspek pembangunan ekonomi dan sosial. Statuta konperensi telah menghasilkan resolusi dan rekomendasi mengenai masalah-masalah yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat, seperti HIV/AIDS, masalah metropolitan, lapangan pekerjaan dalam era globalisasi, hak mendapatkan makanan, keadaan hutang negara-negara miskin, konsumsi dan perdagangan gelap obat-obat terlarang, perlindungan anak dan eksploitasi seks anak-anak.

C. Keuangan dan Perdagangan Internasional

Selama beberapa tahun, IPU telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatan WTO, Lembaga-lembaga Bretton Woods dan UNCTAD. Dalam menhadapi krisis keuangan dan ekonomi yang baru-baru ini melanda dunia, IPU mendorong anggota parlemen untuk mencari upaya mengatasi dampak krisis global ini dengan mengadakan beberapa pertemuan khusus.

10. Kerjasama dengan PBB dan Badan-badan PBB

Pada Nopember 2002, IPU mendapatkan status peninjauan (*observer*) di PBB, di samping itu, IPU diberi hak khusus untuk mendistribusikan dokumen-dokumen IPU

pada Sidang Umum PBB. Sejak penyelesaian Perjanjian Kerjasama 1996, IPU telah bekerja sama secara baik dengan PBB dan berbagai badan-badan khusus PBB. Setiap tahun, selama berlangsungnya Sidang Umum PBB, IPU menyelenggarakan pertemuan di PBB New York di mana pada anggota parlemen dan para pejabat senior PBB bertemu dan membicarakan masalah-masalah yang menjadi kepentingan umum.

Pada saat penyelenggaraan Sidang Umum Millenium PBB, IPU menyelenggarakan Konperensi para Ketua Parlemen yang pertama. Sidang yang diadakan di Markas Besar PBB di New York ini menghasilkan sebuah deklarasi yang menegaskan dukungan parlemen terhadap PBB dan komitmennya untuk menjamin bahwa suara rakyat akan lebih didengarkan oleh lembaga tersebut. Para ketua atau pimpinan parlemen mengikrarkan komitmen bagi kerjasama internasional, dengan lembaga PBB yang lebih kuat sebagai intinya. Kami memutuskan untuk menjamin bahwa parlemen kami memberikan kontribusi yang lebih substansif lagi untuk kerjasama ini membuat suara rakyat lebih didengarkan lagi, dengan cara memperkenalkan dimensi demokrasi yang lebih jelas lagi ke dalam pengambilan keputusan dan kerjasama internasional.

Pandangan PBB atas IPU: Parlemen adalah Tempat Utama Legitimasi Demokrasi

Mr. Kofi Annan, Sekretaris Jenderal PBB dan pemenang Hadiah Nobel Perdamaian 2001, pada Konperensi Pertama para Pemimpin Parlemen Nasional, yang diselenggarakan oleh IPU pada 2002,

menegaskan bahwa Parlemen adalah tempat utama legitimasi demokrasi. Dengan menggunakan hak legislatif dan mandat demokrasi, Parlemen bisa menjadi “mimbar rakyat” sejati terhadap batas tradisional. Parlemen mempunyai peranan yang unik untuk dijalankan untuk membawa lembaga-lembaga global lebih dekat kepada rakyat yang harus dilayani. Secara bersama, PBB dan anggota parlemen, dapat berbuat banyak berbuat banyak untuk merobohkan dinding kecurigaan – dengan cara menjelaskan perubahan global kepada masyarakat, dan di atas semuanya itu, dengan meyakinkan bahwa perubahan – perubahan tersebut adalah untuk kepentingan mereka. Untuk mencapai usaha ini, diperlukan sebuah PBB yang efektif dan reponsif. PBB menyambut baik dukungan penuh terhadap reformasi PBB seperti yang telah dinyatakan dalam Deklarasi IPU. Selama tiga tahun terakhir, dukungan diperoleh untuk memperkuat hubungan PBB dengan IPU, karena menyadari bahwa perlu mencari inspirasi pembaruan dari masyarakat. Diharapkan PBB mendatang lebih reponsif terhadap kebutuhan para wakil masyarakat global.

Kerjasama IPU dan PBB

- Saat ini IPU mempunyai kantor perwakilan di New York sebagai Peninjau Tetap (*Permanent Observer*) di PBB.
- IPU juga telah mengadakan perjanjian kerjasama dengan ILO, FAO, UNDP dan UNESCO. IPU telah menandatangani Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) dengan Kantor Komisi Tinggi HAM (*the High Commissioner for*

Human Rights). IPU senantiasa memelihara hubungan kerjasama yang baik dengan berbagai asosiasi parlemen regional. Peninjau untuk IPU antara lain Palestina, berbagai organisasi antar pemerintah seperti Liga Negara-negara Arab, Organisasi Negara-negara Amerika, Uni Afrika, dan organisasi-organisasi kemanusiaan termasuk Komisi Palang Merah Internasional (ICRC) dan Amnesty Internasional. IPU juga bekerja sama dengan Lembaga Internasional untuk Demokrasi dan Bantuan Elektoral (IDEA).

11. Keanggotaan dalam IPU

Gambaran keanggotaan IPU tidak pernah tetap. Disatu sisi, IPU secara regular menerima permintaan afiliasi dari parlemen-parlemen bukan anggota; di sisi lain, anggota-anggota yang lembaga-lembaga demokrasinya organisasi ini. Per Juli 2017, IPU mempunyai 173 negara sebagai anggota, dan 11 *associate member*.

Member Parliaments

Afghanistan, Albania, Algeria, Andorra, Angola, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaijan, Bahrain, Bangladesh, Belarus, Belgium, Benin, Bhutan, Bolivia, Bosnia and Herzegovina, Botswana, Brazil, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, Cambodia, Cameroon, Canada, Cape Verde, Central African Republic, Chad, Chile, China, Columbia, Comoros, Congo, Costa Rica, Cote d'Ivoire, Croatia, Cuba, Cyprus, Czech Republic, Democratic People's Republic of Korea, Democratic Republic of the Congo,

Denmark, Djibouti, Dominican Republic, Ecuador, Egypt, El Salvador, Equatorial Guinea, Estonia, Ethiopia, Fiji, Finland, France, Gabon, Gambia, Georgia, Germany, Ghana, Greece, Guatemala, Guinea, Guinea Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Hungary, Iceland, India, Indonesia, Iran (Islamic Republic of), Iraq, Ireland, Israel, Italy, Japan, Jordan, Kazakhstan, Kenya, Kuwait, Kyrgyzstan, Lao People's Democratic Republic, Latvia, Lebanon, Lesotho, Liberia, Libya, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Madagascar, Malawi, Malaysia, Maldives, Mali, Malta, Mauritania, Mauritius, Mexico, Monaco, Mongolia, Montenegro, Morocco, Mozambique, Myanmar, Namibia, Nepal, Netherlands, New Zealand, Nicaragua, Niger, Nigeria, Norway, Oman, Pakistan, Palau, Palestine, Panama, Papua New Guinea, Paraguay, Peru, Philippines, Poland, Portugal, Qatar, Republic of Korea, Republic of Moldova, Romania, Russian Federation, Rwanda, Samoa, San Marino, Sao Tome and Principe, Saudi Arabia, Senegal, Serbia, Seychelles, Sierra Leone, Singapore, Slovakia, Slovenia, Somalia, South Africa, South Sudan, Swaziland, Spain, Sri Lanka, Sudan, Suriname, Sweden, Switzerland, Syrian Arab Republic, Tajikistan, Thailand, Timor-Leste, The former Yugoslav Republic of Macedonia, Togo, The Former Yugoslav Republic of Macedonia, Trinidad and Tobago, Tunisia, Turkey, Uganda, Ukraine, United Arab Emirates, United Kingdom, United Republic of Tanzania, Uruguay, Venezuela, Vietnam, Yemen, Zambia, Zimbabwe.

Associate Members

Andean Parliament, Arab Parliament, Central American Parliament, East African Legislative Assembly, European Parliament, Inter-Parliamentary Assembly of Member Nations of the Commonwealth of Independent States, Inter-Parliamentary Committee of the West African Economic and Monetary Union, Latin American Parliament, Parliamentary Assembly of the Council of Europe, Parliament of the Central African Economic and Monetary Community, Parliament of the Economic Community of West African States.

Alamat Inter-Parliamentary Union

Chemin du Pommier 5
Case Postale 330
CH-1218 Le Grand-Saconnex
Geneva
Switzerland
Phone (41 22) 919 41 50
Fax (41 22) 919 41 60
Email : postbox@mail.ipu.org
<http://www.ipu.org>

Alamat Perwakilan Tetap IPU di PBB

821, United Nations Plaza 9th Floor
New York, NY 1017
USA
Phone (1 212) 557 58 80,
Fax (1 212) 557 39 54
Email: ny-office@mail.ipu.org

Peran dan Partisipasi DPR RI di IPU

DPR-RI telah menjadi anggota resmi IPU sejak tahun 1959 namun baru sejak tahun 1976 mulai secara rutin mengirimkan delegasinya ke Konferensi-Konferensi IPU. Delegasi DPR-RI kemudian berpartisipasi aktif dan kontinyu dalam kegiatan-kegiatan IPU, baik yang pertemuan Assembly yang rutin diselenggarakan 2 (dua) kali setiap tahunnya maupun sidang-sidang lain yang disponsori oleh IPU bekerjasama dengan badan-badan dibawah PBB. Dengan demikian Indonesia sehingga semakin dikenal oleh anggota-anggota dari delegasi-delegasi parlemen nasional negara lain.

Kehadiran Delegasi DPR dalam setiap pertemuan selalu dimanfaatkan untuk memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya yaitu dengan selalu terpilihnya Delegasi DPR-RI dalam keanggotaan Panitia Perumus (Drafting Committee) dalam berbagai Sidang Komisi IPU sehingga memberikan akses bagi terakomodasinya kepentingan-kepentingan nasional Indonesia dalam berbagai masalah yang sedang dibahas. Delegasi DPR-RI melalui berbagai kesempatan berbagai bidang sidang yang berlangsung selama konferensi juga melakukan upaya lobbying yang intensif dan berkesinambungan dengan berbagai pihak kawan maupun lawan di sela-sela konferensi. Menengok kebelakang, misalnya ketika masalah Timor Timur masih menjadi agenda pembahasan di IPU sejak 1983, Delegasi DPR-

RI telah berhasil menggagalkan usaha-usaha pihak Portugal dan kelompok-kelompok pendukungnya untuk memasukkan masalah Timor Timur ke dalam Resolusi IPU. Kemudian pada kesempatan Konferensi ke-102 IPU di Berlin tahun 1999, Delegasi DPR-RI berhasil menarik simpati pihak lawan maupun kawan untuk mendukung Indonesia dan berhasil menangkis serangan Portugal, Jerman, Belanda, Austria, Islandia, Australia dan New Zealand yang telah menuduh Pemerintah RI mendukung kegiatan kelompok milisia, dan menuntut dibentuknya pengadilan terhadap kejahatan kemanusiaan di Timor Timur.

Dalam pembahasan Hak Asasi Anggota Parlemen, Delegasi DPR-RI telah dapat memberikan respon yang baik atas kasus pelanggaran hak asasi manusia terhadap beberapa mantan anggota Parlemen Indonesia yang dibahas dalam *Committee for Human Rights of Parliamentarians* IPU seperti kasus Sundari Abdurrachman, Aberson Sihalo, ri Bintang Pamungkas, dan Megawati Sukarnoputri. Pada saat ini yang masih dibahas adalah kasus terbunuhnya anggota DPR-RI Tengku Nasharuddin Daud di Medan tahun 1999 dan kasus pembayaran ganti rugi yang tidak sesuai yang dialami oleh Edi Tanumiharja (Anggota DPR GR).

Selain hal-hal yang menyangkut permasalahan yang langsung terkait dengan kepentingan nasional Indonesia, kontribusi Delegasi DPR-RI dalam forum IPU juga diberikan dalam bentuk sumbangan pemikiran sebagai upaya mencari solusi sejumlah permasalahan global. Kontribusi

pemikiran ini biasanya disampaikan dalam acara sidang General Debate dimana setiap delegasi dapat menyampaikan pandangan-pandangannya mengenai berbagai pemersalahan global dan pandangannya atas situasi politik, ekonomi dan sosial dunia dewasa ini.

Peran aktif Grup Nasional Parlemen Indonesia dibuktikan dengan diperolehnya kesempatan untuk berperan serta secara lebih mendalam dalam berbagai kegiatan IPU dengan menduduki beberapa jabatan penting atau menjadi anggota organ penting dalam organisasi IPU. Marzuki Darusman, Tati Sumiyati Darsoyo, Theo L. Sambuaga, Zamharir AR, dan FX Ferry Tinggogy adalah beberapa nama-nama anggota Delegasi DPR-RI yang pernah menduduki jabatan strategis pada era 1990-an. Kemudian tahun 2000an, Grup Nasional Parlemen Indonesia memegang jabatan *Substitute Member* dalam *Committee on the Human Rights of Parliamentarians* untuk periode 2001-2004 yang dipercayakan kepada Sabam Sirait, serta *Substitute Member dalam Coordinating Committee on Peace and International Security* untuk periode 2003-2004 yang kedua-duanya dijabat oleh Iris Indira Murti.

Pada periode tahun 2004-2009, peran Delegasi DPR RI di IPU semakin meningkat. Beberapa Anggota DPR RI kembali menduduki posisi yang sangat strategis di IPU, yaitu Abdillah Toha sebagai anggota sekaligus Wakil Presiden *Executive Committee*, Simon Patrice Morin sebagai *First Vice President dari Standing Committee for Peace and International Security*, Angelina

Sondakh dan Aisyah Hamid Baidlowi sebagai anggota *Coordinating Committee of women Parliamentarians*, Luthfi Hasan Ishaq sebagai Anggota Komisi *Middle East Questions* dan terpilih menjadi anggota *Committee to Promote Respects for International Humanitarian Laws*.

Pada periode 2014-2019, Dr. Nurhayati Ali Assegaf, M.Si terpilih menjadi *Member of Committee to Promote Respects for International Humanitarian Laws*. H. Rofi Munawar, Lc terpilih menjadi Dr. Evita Nursanty terpilih menjadi Anggota Komisi *Middle East Questions*, dan Dr. Evita Nursanty terpilih menjadi *Member of the Committee on UN affairs*. Pada akhir tahun 2016, Dr. Nurhayati Ali Assegaf terpilih menjadi *President of Committee to Promote Respects for International Humanitarian Laws*. Dan pada Maret 2017, Irine Yusiana Roba Putri terpilih sebagai *Board Member of Forum of Young Parliamentarians*.

Terpilihnya Anggota DPR RI dalam jajaran pimpinan sejumlah komisi di IPU adalah refleksi dari keinginan DPR RI untuk lebih berperan aktif di kancah internasional dan kepercayaan dari IPU atas peran aktif Delegasi DPR RI Di Organisasi tersebut. Dalam usaha pencapaiannya, anggota DPR RI harus berjuang melalui proses *lobby* yang cukup panjang dan terkadang melalui voting.

Sebagai bagian dari dinamika menjadi anggota aktif di IPU, DPR RI mencalonkan Ketua DPR RI, Agung Laksono, menjadi Presiden IPU untuk periode tahun 2008-2011 dan pada tahun 2014, DPR RI mencalonkan

Dr. Nurhayati Ali Assegaf menjadi Presiden IPU untuk Periode 2014-2017.

Dengan adanya upaya reformasi dalam organisasi IPU, Delegasi DPR-RI juga telah turut serta membeikan sumbangan pemikiran berupa usulan-usulan dalam amandemen Statuta IPU. Diharapkan agar nantinya partisipasi aktif Delegasi DPR-RI dalam forum PU akan terus meningkat sesuai dengan dua misi yang diembannya. Pertama, misi yang bersifat umum/global yaitu mempertahankan serta melaksanakan politik luar negeri Indonesia yang bebasaktif berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dan GBHN yang menyangkut kepentingan dan martabat bangsa Indonesia.

Association of Secretaries General of Parliaments (ASGP)

Asosiasi Sekretaris Jenderal Parlemen

ASGP adalah badan konsultatif IPU yang menghimpun pejabat-pejabat senior keparlemenan untuk mempelajari keparlemenan; dari sisi hukum, prosedur dan mekanisme kerja parlemen dan untuk mencari langkah-langkah untuk meningkatkan metode-metode ini; dan untuk memperkuat kerjasama antara badan pendukung kegiatan parlemen. ASGP juga membantu IPU. Atas permintaan IPU, untuk mempelajari berbagai subject yang berkaitan dengan tugas keparlemenan.

ASGP, adalah badan yang independen yang mengadakan pertemuan selama berlangsungnya Sidang-sidang IPU. Tujuan

dan kegiatan ASGP meliputi pembelajaran undang-undang, praktek dan prosedur parlemen, dan merekomendasikan kepada parlemen untuk meningkatkan metode kerja. Agenda yang dibahas dalam sidang-sidang ASGP misalnya peran parlemen dalam memajukan rekonsiliasi setelah pertikaian sipil, kode etik parlemen dan pembangunan teknologi informasi dan komunikasi. Tujuan lain adalah bersama-sama dengan IPU memberikan bantuan teknis keahlian kepada parlemen yang membutuhkan. Sejak tahun 2006, IPU dan ASGP bersama-sama menyelenggarakan sidang bersama Jenewa tentang topik yang berkaitan dengan kinerja parlemen. Tahun 2008 konperensi yang diadakan berjudul *parliamentary library and reseacrh services*.

ASGP mempublikasikan review dua tahunan yang berjudul *Constitutional and Parliamentary Information* serta laporan kegiatan dan pemberdayaan parlemen-parlemen. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh ASGP dokumentasinya dapat diakses melalui website IPU.

Sekretaris Jenderal DPR RI, Dr.Winantuningtyastiti S, menjabat sebagai Anggota Executive Committee ASGP untuk periode 2014-2017. Kedepan diharapkan Sekjen DPR RI dapat kembali menjadi Anggota Executive Committee ASGP.